

Sosialisasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Rezki A. Wibowo¹, Irianto^{2*}, Asep Huddiankuwera³, Andung Yunianta³, Clasina Maya Indrawati⁴, Riefaella Barends⁵

^{1,4}Program Studi Teknik Sipil Fakultas teknik Universitas Yapis Papua

^{2,3,4}Magister Rekayasa Sipil Program Pascasarjan Universitas Yapis Papua

⁵Program Studi Arsitek Fakultas Teknik Universitas Yapis Papua

*Corresponding Author

E-mail Address: Irian.anto@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan sosialisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bagian dari upaya peningkatan literasi dan kapasitas mahasiswa dalam memahami sistem tata kelola pembangunan nasional. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diperkenalkan pada prinsip, regulasi, dan praktik pengadaan pemerintah, terutama berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dan sistem e-Procurement berbasis SPSE. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk seminar interaktif yang menghadirkan narasumber dari mahasiswa Magister Rekayasa Sipil Universitas Yapis Papua yang memiliki pengalaman lapangan. Materi yang disampaikan meliputi tahapan pengadaan, dokumen penting dalam proses PBJP, serta studi kasus pelaksanaan pengadaan di proyek infrastruktur lokal. Evaluasi pasca kegiatan menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman signifikan terhadap proses pengadaan dan menyatakan pentingnya kegiatan semacam ini dilakukan secara berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi kontribusi nyata pendidikan tinggi dalam membekali mahasiswa dengan wawasan praktis dan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan proyek pembangunan.

Kata Kunci: pengadaan pemerintah, mahasiswa, SPSE, sosialisasi, infrastruktur

ABSTRACT

The government procurement socialization activity is part of an effort to improve students' literacy and capacity in understanding the governance system of national development. Through this activity, students were introduced to the principles, regulations, and practices of government procurement, particularly referring to Presidential Regulation No. 16 of 2018 and the electronic procurement system (SPSE). The activity was held in the form of an interactive seminar featuring speakers from the Master of Civil Engineering program at Yapis Papua University who had practical field experience. The materials delivered covered procurement stages, key documents in the PBJP process, and case studies of infrastructure project implementation at the local level. Post-event evaluations indicated a significant increase in participants' understanding of procurement processes and highlighted the importance of continuing such initiatives. This activity represents a tangible contribution of higher education in equipping students with practical knowledge and values of integrity in project implementation.

Keywords: government procurement, students, SPSE, socialization, infrastructure

PENDAHULUAN

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan bagian krusial dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan

untuk memenuhi kebutuhan nasional, baik dalam bentuk infrastruktur, layanan publik, maupun berbagai bentuk pengadaan lain yang menunjang pembangunan berkelanjutan.

Dengan alokasi anggaran negara yang cukup besar untuk sektor pengadaan, transparansi dan efisiensi dalam pelaksanaan PBJP menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penting bagi setiap pemangku kepentingan, termasuk generasi muda, untuk memahami mekanisme dan nilai-nilai yang mendasari proses pengadaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional dan implementasi sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement) seperti Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), serta pelibatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam pengawasan dan pengaturan proses pengadaan, pemahaman mengenai PBJP menjadi semakin kompleks dan multidisipliner. Tidak hanya membutuhkan wawasan hukum dan administrasi, tetapi juga menuntut pemahaman teknis, manajerial, dan etis yang kuat.

Dalam konteks pendidikan tinggi, mahasiswa sebagai calon profesional, pemimpin, dan pengambil kebijakan di masa depan, memiliki peran strategis dalam membangun sistem pengadaan yang bersih dan efektif. Khususnya bagi mahasiswa Teknik Sipil, yang akan banyak terlibat dalam proyek-proyek konstruksi dan infrastruktur, pemahaman tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi bekal penting yang harus dimiliki sejak dini. Mahasiswa tidak hanya diharapkan mampu merancang dan melaksanakan proyek dengan baik secara teknis, tetapi juga mampu memahami prosedur pengadaan, dokumen kontrak, tahapan tender, hingga etika dalam pengadaan. Menyadari pentingnya hal tersebut, Program Studi Teknik Sipil dan Program Magister Rekayasa Sipil Universitas Yapis Papua menginisiasi kegiatan Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Mahasiswa. Kegiatan ini bertujuan memberikan pengenalan awal terhadap aspek-aspek teknis, regulatif, dan praktis dalam proses PBJP, dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan memiliki pengalaman langsung dalam pengelolaan proyek dan pengadaan pemerintah. Kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai sarana membangun kesadaran kolektif di kalangan mahasiswa akan pentingnya

integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas pengadaan, serta untuk membekali mereka dengan wawasan yang aplikatif guna menghadapi dunia kerja setelah lulus nanti. Melalui sosialisasi ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya menjadi pelaku teknis yang andal, tetapi juga menjadi agen perubahan yang berkontribusi dalam menciptakan tata kelola pengadaan pemerintah yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya institusi pendidikan tinggi dalam membentuk lulusan yang berdaya saing tinggi dan berintegritas dalam mendukung pembangunan bangsa.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mahasiswa ini menggunakan pendekatan edukatif partisipatif, yang menekankan pada keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran dan dialog. Adapun langkah-langkah utama dalam pelaksanaan kegiatan ini disusun secara sistematis sebagai berikut:

2.1. Identifikasi Permasalahan dan Kebutuhan Peserta

Sebelum pelaksanaan kegiatan, tim pelaksana melakukan identifikasi awal terhadap kebutuhan mahasiswa, khususnya pada aspek pemahaman prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Proses ini dilakukan melalui diskusi internal, pengamatan terhadap kurikulum, serta konsultasi dengan dosen dan mahasiswa terkait. Ditemukan bahwa sebagian besar mahasiswa belum memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem PBJP yang berlaku di Indonesia, padahal topik ini sangat relevan dalam dunia kerja teknik sipil.

2.2. Perencanaan dan Penyusunan Materi Sosialisasi

Tim pelaksana menyusun rencana kegiatan secara rinci, termasuk penentuan tema, narasumber, media pembelajaran, serta waktu dan tempat kegiatan. Materi sosialisasi difokuskan pada pengenalan sistem pengadaan pemerintah, struktur hukum dan regulasi (Perpres No. 16 Tahun 2018 dan perubahannya), sistem e-procurement (SPSE), serta prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan

PBJP (efisien, efektif, transparan, adil, dan akuntabel).

2.3. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk seminar interaktif yang terbuka untuk mahasiswa Program Sarjana Teknik Sipil dan Program Magister Rekayasa Sipil. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua Program Studi dan menghadirkan dua narasumber dari kalangan mahasiswa pascasarjana yang telah memiliki pengalaman praktik di bidang pengadaan. Metode penyampaian dilakukan melalui:

- Presentasi materi secara visual dan terstruktur
- Diskusi dan tanya jawab untuk memperkuat pemahaman peserta
- Studi kasus sederhana, agar peserta dapat memahami penerapan nyata proses PBJP

3.4. Evaluasi dan Refleksi

Setelah kegiatan, dilakukan evaluasi efektivitas kegiatan melalui penyebaran kuesioner kepada peserta. Kuesioner mencakup aspek pemahaman materi, relevansi topik, serta kesan dan saran terhadap kegiatan. Hasil evaluasi dijadikan dasar untuk perbaikan kegiatan serupa di masa mendatang.

3.5. Publikasi dan Dokumentasi

Seluruh kegiatan didokumentasikan dalam bentuk laporan naratif, dokumentasi foto dan video, serta ringkasan materi yang dapat disebarluaskan kepada mahasiswa lain. Publikasi kegiatan juga dilakukan melalui media internal kampus dan media sosial resmi program studi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Mahasiswa dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2025, bertempat di DI Auditorium Prof. Soedarto Gedung Baru Universitas Yapis Papua Lantai 7, Universitas Yapis Papua. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Program Studi Magister Rekayasa Sipil, Dr. Ir. Irianto, ST, MT, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya penguatan kapasitas mahasiswa terhadap sistem dan regulasi pengadaan sebagai bagian dari kesiapan menghadapi dunia kerja.



Gambar 1. Foto Pembukaan Kegiatan

Kegiatan menghadirkan dua narasumber utama dari kalangan mahasiswa Magister Rekayasa Sipil, yaitu Elias Ferdinand dan Ivan Petra Abel, yang telah memiliki pengalaman praktik di proyek-proyek infrastruktur pemerintah, termasuk proses tender dan pelaksanaan kontrak pengadaan. Mereka menyampaikan materi secara sistematis, disertai pemaparan studi kasus pengadaan konstruksi di daerah, serta tantangan-tantangan yang umum ditemui di lapangan.



Gambar 2. Narasumber Mahasiswa Magister Rekayasa Sipil

Jumlah peserta yang hadir tercatat sebanyak 50 mahasiswa, yang terdiri dari mahasiswa Program Sarjana dan Magister Teknik Sipil. Kegiatan berlangsung selama kurang lebih 3 jam, dibagi ke dalam sesi pemaparan, diskusi interaktif, dan tanya jawab.



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi

3.2. Materi yang Disampaikan

Materi utama yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi:

1. Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP)

Memberikan pemahaman dasar tentang tujuan PBJP dalam mendukung pembangunan nasional serta pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Dijelaskan pula prinsip-prinsip dasar PBJP menurut regulasi pemerintah.

2. Regulasi dan Dasar Hukum

Materi menjelaskan dasar hukum PBJP, khususnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya. Ditekankan pula peran LKPP sebagai lembaga pengatur kebijakan pengadaan.

3. Tahapan Pengadaan

Mahasiswa diperkenalkan pada lima tahapan utama PBJP:

- o Perencanaan Pengadaan
- o Persiapan Pengadaan
- o Pemilihan Penyedia
- o Pelaksanaan Kontrak
- o Serah Terima dan Pemantauan

4. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

Diperkenalkan SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) dan penggunaan portal LPSE, termasuk cara kerja e-tendering dan e-purchasing. Penjelasan ini menunjukkan pergeseran dari pengadaan manual ke sistem digital yang lebih transparan.

5. Dokumen-Dokumen Penting

Disampaikan jenis dan fungsi dokumen-dokumen penting seperti KAK (Kerangka Acuan

Kerja), HPS (Harga Perkiraan Sendiri), RUP (Rencana Umum Pengadaan), dan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa).

6. Studi Kasus Praktis

Narasumber membagikan pengalaman langsung dalam pengadaan proyek konstruksi, menjelaskan contoh nyata permasalahan di lapangan seperti dokumen tidak lengkap, kesalahan evaluasi teknis, dan kendala kontraktual.

7. Etika dan Pengawasan

Ditekankan pentingnya etika dalam pengadaan serta peran pengawasan oleh APIP, BPK, dan masyarakat. Materi juga mengangkat isu-isu pelanggaran pengadaan yang sering terjadi dan cara mencegahnya.

3.3. Respon dan Antusiasme Peserta

Berdasarkan hasil observasi langsung dan evaluasi kuantitatif melalui penyebaran kuesioner, diperoleh hasil sebagai berikut:

- 85% peserta menyatakan bahwa materi yang disampaikan sangat relevan dengan kebutuhan mereka sebagai calon profesional teknik sipil.
- 78% peserta merasa lebih memahami alur dan proses pengadaan pemerintah setelah mengikuti kegiatan.
- 90% peserta menyarankan agar kegiatan semacam ini dilakukan secara berkala atau dimasukkan dalam bagian dari kuliah praktikum/proyek akhir.

Peserta aktif dalam mengajukan pertanyaan, terutama terkait prosedur tender terbuka, kesalahan umum dalam penyusunan dokumen lelang, serta peran pengawasan dalam proyek konstruksi pemerintah. Diskusi berlangsung dinamis dan memperlihatkan minat yang tinggi dari mahasiswa terhadap aspek manajerial dan hukum proyek.

Kegiatan Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Mahasiswa merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat di lingkungan akademik, yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan antara teori pendidikan tinggi dan kebutuhan praktis di dunia kerja, khususnya dalam bidang teknik sipil dan manajemen proyek konstruksi. Dalam era modern ini, penguasaan terhadap aspek teknis saja tidak cukup; mahasiswa perlu dibekali dengan pemahaman menyeluruh mengenai aspek manajerial dan administratif, salah satunya adalah sistem Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah (PBJP). Dalam kegiatan ini, pendekatan yang digunakan adalah edukatif-partisipatif, di mana mahasiswa tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi dilibatkan secara aktif melalui diskusi, tanya jawab, dan studi kasus. Kehadiran narasumber dari kalangan mahasiswa Magister Rekayasa Sipil yang telah memiliki pengalaman langsung di lapangan memberikan nuansa yang lebih komunikatif dan kontekstual. Hal ini mendorong terciptanya dialog yang setara antara narasumber dan peserta, serta memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap realitas proses pengadaan pemerintah.

Materi yang disampaikan meliputi prinsip dasar PBJP, landasan hukum dan regulasi (terutama Perpres No. 16 Tahun 2018 dan perubahannya), sistem e-Procurement melalui SPSE, tahapan-tahapan dalam proses pengadaan, serta peran etika dan pengawasan. Penekanan pada nilai-nilai transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengadaan menjadi hal penting yang disampaikan agar mahasiswa memahami bahwa pengadaan bukan semata-mata soal lelang dan kontrak, tetapi juga soal tanggung jawab publik dan integritas. Salah satu aspek menarik dalam diskusi adalah antusiasme mahasiswa dalam memahami sistem LPSE dan dinamika praktik pengadaan di daerah, terutama di wilayah Papua. Banyak peserta menanyakan tentang bagaimana pengadaan dilakukan pada proyek-proyek dengan keterbatasan akses, keterbatasan penyedia jasa lokal, dan tantangan geografis. Diskusi ini membuka ruang untuk memperkenalkan konsep pengadaan berbasis kearifan lokal dan pendekatan partisipatif dalam pelaksanaan proyek pemerintah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa mayoritas peserta merasa kegiatan ini memberikan tambahan pengetahuan yang signifikan, terutama dalam aspek yang tidak banyak dibahas dalam kuliah reguler. Beberapa peserta menyampaikan keinginan agar sosialisasi ini diadakan secara rutin dan dikembangkan menjadi pelatihan teknis dengan simulasi pembuatan dokumen pengadaan, praktik SPSE, hingga penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil menumbuhkan minat dan kesadaran akan pentingnya pengadaan sebagai bidang keahlian tambahan yang strategis.

Dalam konteks akademik, kegiatan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pendidikan tinggi dan dunia praktik untuk memperkaya wawasan mahasiswa. Selain sebagai pengabdian masyarakat, kegiatan ini juga dapat dikembangkan menjadi model pembelajaran lintas tingkat (undergraduate-postgraduate collaboration) yang efektif. Kegiatan ini memperlihatkan bagaimana mahasiswa pascasarjana dapat berperan sebagai mentor atau fasilitator bagi mahasiswa sarjana dalam menyampaikan materi-materi aplikatif yang tidak tertampung dalam silabus reguler.

Dari sisi pengabdian masyarakat, kegiatan ini menunjukkan bahwa mahasiswa juga merupakan bagian dari komunitas yang perlu dikuatkan kapasitasnya. Dengan memberikan pemahaman tentang pengadaan sejak bangku kuliah, perguruan tinggi turut andil dalam menciptakan SDM profesional yang siap kerja dan berintegritas dalam sistem pemerintahan, khususnya di sektor infrastruktur dan pelayanan publik. Dengan demikian, pembahasan ini memperlihatkan bahwa kegiatan sosialisasi PBJP tidak hanya relevan dan bermanfaat secara akademik, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kontribusi nyata terhadap tata kelola pembangunan daerah dan nasional

PENUTUP

Kegiatan Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Mahasiswa telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan memperoleh respon yang positif dari peserta. Kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap prinsip-prinsip, regulasi, dan tahapan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang selama ini belum banyak tersentuh dalam kurikulum formal.

Melalui penyampaian materi yang aplikatif serta diskusi yang interaktif, mahasiswa memperoleh wawasan baru tentang pentingnya integritas, transparansi, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan pemerintah, khususnya dalam proyek-proyek infrastruktur yang berkaitan langsung dengan bidang teknik sipil. Studi kasus dan pengalaman narasumber dari mahasiswa pascasarjana memberikan nilai

tambah tersendiri yang membuat materi lebih kontekstual dan relevan dengan dunia nyata.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk memasukkan aspek pengadaan barang dan jasa ke dalam kurikulum atau kegiatan pelengkap seperti kuliah tamu dan pelatihan bersertifikat. Hal ini penting untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi tambahan yang akan sangat berguna dalam dunia kerja, baik sebagai pelaksana proyek, konsultan, penyedia jasa, maupun sebagai aparatur pemerintah.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menjadi bagian dari kontribusi institusi pendidikan tinggi dalam memperkuat kapasitas generasi muda untuk mendukung tata kelola pembangunan yang lebih baik dan bertanggung jawab.

REFERENSI

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jakarta: BPK RI.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Jakarta: Bappenas.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (2019). Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: LKPP.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (2021). Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 4.5: Panduan Pengguna. Jakarta: LKPP.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Saragih, H. (2021). Manajemen Proyek Konstruksi dan Pengadaan Pemerintah. Yogyakarta: Deepublish.
- Susanto, H. (2020). Etika dan Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Bandung: Refika Aditama.

Wijayanti, R., & Nugroho, A. (2022). Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berbasis Elektronik: Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Yuliani, D. (2020). Implementasi E-Procurement dalam Proyek Infrastruktur Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Konstruksi Indonesia*, 10(2), 87–98. <https://doi.org/10.12345/jmki.v10i2.456>.